

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fuady, Munir. 2017, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 2004, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketujuh, Jilid Ketiga. Bagian Kesatu*, Bandung, PT. Alumni.
- Hasal, M. Iqbal. 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Hikmah, Mutiara. 2007, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Irawan, Bagus. 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Bandung, Alumni.
- Juwana, Hikmahanto. 2004, *Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional, Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- Jono. 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Moleong, Lexy J. 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Nating, Imran. 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Omar, Paul J. 2008, *International Insolvency Law Themes and Prespectives*, Burlington, Ashgate Publishing Company.
- Rahardjo, Satjipto. 2012, *Ilmu Hukum*, cetakan 7, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Grafiti.

_____. 2018, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Edisi Kedua*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Binacipta.

Subhan, M. Hadi. 2014, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cetakan 4, Jakarta, Kencana-PrenadaMedia Group.

Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Radja Grafindo Persana.

Suryana, Daniel. 2007, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Bandung, Pustaka Sastra.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Stanley, David T dan Marjorie Girth. 1971, *Bankruptcy Problem, Process, Reform*, Washington D.C, The Brookings Instituion.

Tomasic, Roman. 2005, *Insolvency Law In The East Asia*, Ashgate Publishing Limited, England.

Wood, Philip. R. 2007, *Principles of International Insolvency*, London, Thomson Sweet & Maxwell.

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. 2002, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persana.

UNDANG-UNDANG

Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents. 1961.

Convention on The Taking Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters. 1970.

Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, 1971.

Hindia Belanda. *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering*. Staatblad 1849-63.

_____. *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Woor Indonesie*. Staatblad 1874-23.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, cetakan 35, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

United Nations. 1997, *Model Law in Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation*.

JURNAL DAN ARTIKEL

Adolf, Huala. 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Masalah Hukum Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya*, Jurnal Hukum Bisnis: Volume 28 No 3, Desember 2009.

Damardjati, Respati, Emmy Latifah, dan Al. Sentot Sudarwanto, 2017, *Analisis Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean*, Privat Law Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017.

Hardjaloka, Loura. 2015, *Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instumen Nasional di Beberapa Negara*, Yuridika: Volume 30 No 3, September 2015.

Hikmah, Mutiara. *Analisis Kasus-Kasus Kepailitan dari Segi Hukum Perdata Internasional*, (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).

Imran Nating, *Kepailitan dan PKPU Dalam Perspektif Kurator dan Pengurus*, (Presentasi Seminar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019).

Juwana, Hikmahanto. 2002, *Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Traksaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis: Volume 17, Januari 2002

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan *Hukum Nasional*, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: 2017).

Mahkamah Agung RI, 2019, *Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri*, Jakarta.

Priyono, Djoko dan M. Ngamirul Bustanil Ayshar. *Konsep Pengaturan Cross-Border Insolvency Badan Usaha di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Dalam Rangka Mewujudkan Asean Economic Integration*, (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018).

United Nations. 2013, *A Guide to UNCITRAL Basic Facts about the United Nations Commission On International Trade Law*, Vienna, Vienna International Centre.

United Nations. 1997, *Model Law in Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*, New York, United Nations Publishing.

United Nations. 2010, *UNCITRAL Practice Guide in Cross-Border Insolvency Cooperation*, Austria, United Nations Publication.

KAMUS

Bryan A. Garner, ed, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, (St. Paul: West, 2004).

INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pailit>. Diakses pada 28 Maret 2019.

A.A. Oka Mahendra. 2010. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>. Diakses pada 25 Juli 2019.